



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH DARTANTO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **811756**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 7.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 212 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 678.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HADIAH Rp. 18.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 435.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 406.228.287****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 407.330.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. 5.000.000****Sub Total****Rp. 9.157.058.287****III. HUTANG****Rp. 600.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.557.058.287

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.